

**Digitalisasi Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik
di Desa Sungai Baung Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

***Village Digitalization in Increasing the Effectiveness of Public Services in Sungai Baung
Village Pengabuan District West Tanjung Jabung Regency***

**Ovie Yanti^{1*}, Derma S. Gultom², Candra Irawan³, Siti Zaadah⁴, Erika Saputri⁵,
Edi Purwanto⁶**

¹⁻⁶Universitas Jambi, Indonesia

Korespondensi penulis: yantiovie8@gmail.com *

Article History:

Received: Mei 12, 2025;

Revised: Juni 18, 2025;

Accepted: Juli 07, 2025;

Online Available: Juli 09, 2025

Keywords: Effectiveness, Public Services, Village Digitalization.

Abstract: Village digitalization is one of the village government transformation strategies in providing fast, transparent, and easily accessible services to the community. Through the use of village websites, village governments strive to accelerate administrative processes, disseminate public information, and strengthen community participation. The methods used in this community service activity are participatory and collaborative. The results of the activity evaluation show that the implementation of digitalization in Sungai Baung Village has had a positive impact on the efficiency of service time, increased access to information, and community involvement in village development. However, challenges such as limited human resources, internet infrastructure, and community digital literacy are still obstacles that need to be overcome. Therefore, ongoing efforts are needed in training and mentoring, provision of digital facilities, and collaboration between parties to ensure the success of village digitalization as a whole.

Abstrak

Digitalisasi desa merupakan salah satu strategi transformasi pemerintahan desa dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pemanfaatan website desa, pemerintah desa berupaya mempercepat proses administrasi, menyebarluaskan informasi publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah partisipatif dan kolaboratif. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi di Desa Sungai Baung telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu pelayanan, peningkatan akses informasi, dan keterlibatan warga dalam pembangunan desa. Namun, tantangan seperti keterbatasan SDM, infrastruktur internet, dan literasi digital masyarakat masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pelatihan dan pendampingan, penyediaan sarana digital, serta kolaborasi antar pihak untuk memastikan keberhasilan digitalisasi desa secara menyeluruh.

Kata Kunci : Digitalisasi Desa, Efektivitas, Pelayanan Publik.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Digitalisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Bagi desa, transformasi digital tidak hanya soal adopsi perangkat teknologi, tetapi juga tentang perubahan cara kerja, budaya pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat melalui akses

informasi yang lebih terbuka. Digitalisasi merupakan perubahan situasi yang dari manual lalu meningkat kepada teknologi yang meningkatkan efektivitas di masyarakat (Info, 2025). Dalam konteks pembangunan desa, digitalisasi berperan mempercepat pengelolaan data kependudukan, administrasi pelayanan dasar, serta penyampaian informasi dan aspirasi warga. Lebih dari itu, digitalisasi juga mendukung penguatan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah desa. Namun, tantangan dalam bentuk keterbatasan infrastruktur, literasi digital, serta kesiapan sumber daya manusia masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra strategis menjadi kunci sukses dalam mewujudkan desa digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Achmad, 2018). Sebagai wilayah terkecil yang berada dalam struktur pemerintahan negara Indonesia, desa memiliki peranan penting dalam tata pemerintahan (Sugiman, 2018). Begitu pula dengan Desa Sungai Baung yang terletak di wilayah Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Desa Sungai Baung merupakan unit pemerintahan terkecil memegang peranan penting dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Selama ini, pelayanan publik di desa masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti proses administrasi yang lambat, pencatatan data yang manual, serta kurangnya akses informasi yang terbuka dan real-time. Hasil survey menunjukkan bahwa digitalisasi di Desa Sungai Baung belum berjalan dengan baik, yang terlihat dari website desa yang pengelolaannya masih belum maksimal karena keterbatasan pemahaman perangkat desa terhadap teknologi informasi. Informasi pada website yang jarang di *update*, sehingga website desa belum memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efisiensi pelayanan serta terbatasnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Digitalisasi tidak hanya memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat dan akurat, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap informasi publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah desa, serta mendukung pengelolaan sumber daya dan perencanaan pembangunan berbasis data. Selain itu, digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sehingga diperlukan dalam sebuah instansi pemerintahan (Gaspar et al., 2023).

Pelayanan publik adalah bentuk hak warga yang di fasilitasi pemerintah negara kepada masyarakat (Rizky et al., 2025). Pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai (Gislawati & Karniawati, 2024). Selain itu, digitalisasi desa merupakan langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara desa dan kota, serta mendorong terciptanya desa yang maju, mandiri, dan kompetitif (Lailiyah, 2022).

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan metode partisipatif dan kolaboratif di mana mahasiswa yang mengabdikan bukan hanya penerima pengetahuan melainkan menyalurkan pengetahuan yang bermanfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia (Maarif, 2024). Pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa merupakan suatu paduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada partisipasi atau peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah mengakar dan budaya masyarakat Indonesia (Sangian et al., 2018). Adapun pendekatan kolaboratif diwujudkan melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa dan mahasiswa sebagai pelaksanaan program (Irian et al., 2025). Agar kedua pendekatan dapat berjalan efektif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian, maka mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah Pemerintah Desa Sungai Baung, Masyarakat Desa Sungai Baung seperti Kelompok PKK, Kelompok UMKM dan Karang Taruna Desa Sungai Baung.

Pemerintah Desa dalam kegiatan pengabdian ini adalah memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan. Dipilihnya Kantor Desa Sungai Baung sebagai lokasi pelaksanaan program pengabdian karena telah memiliki situs web resmi sebagai sarana informasi dan komunikasi desa. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal. Sesuai dengan rencana yang telah di susun oleh tim pengabdian Manajemen Pemerintahan FEB Universitas Jambi, maka tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang dijalankan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

No	Tahapan Pelaksanaan	Uraian Kegiatan
1	Tahap Awal	1. Mengadakan pembagian tugas antar anggota tim pengabdian yang terdiri atas 6 orang. 2. Mempersiapkan surat menyurat terkait rencana kegiatan pengabdian dengan mitra.
2	Tahap Pendekatan	1. Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah desa terkait jadwal pelaksanaan survey awal ke lokasi dimana mitra berada. 2. Melaksanakan survey awal ke lokasi dimana mitra berada sesuai dengan jadwal yang telah disepakati Tim dan Mitra 3. Menyusun proposal kegiatan pengabdian berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dilapangan.
3	Tahap Pelaksanaan	1. Kegiatan pengabdian yang berbentuk pendampingan terhadap mitra dalam memanfaatkan website desa guna mendukung pelayanan publik desa yang dilaksanakan oleh tim pengabdian dijadwalkan berlangsung selama lima bulan, mulai 17 Februari 2025 sampai 02 Juni 2025. 2. Ada beberapa kegiatan yang diagendakan dalam kegiatan pendamping ini, yaitu sosialisasi mengenai pentingnya website desa, pemanfaatan website desa, serta prosedur pelayanan publik berbasis digital. 3. Melaksanakan kegiatan pembuatan profil desa pada website desa, penginputan data penduduk desa, serta update informasi desa.
4	Tahap Evaluasi	1. Kelengkapan data desa yang sudah tersedia pada website desa 2. Mengumpulkan umpan balik dari mitra dan masyarakat yang menggunakan website desa sebagai sarana komunikasi dan informasi. 3. Menganalisis kegiatan dan proses pendampingan yang telah dilaksanakan untuk memastikan efektivitas kegiatan melalui kemampuan memanfaatkan website desa.
4	Tahap Penutup	1. Dengan berakhirnya kegiatan pendampingan yang diberikan oleh tim pengabdian, kelompok sasaran yang terdiri dari Perangkat Desa, Kelompok UMK, Kelompok PKK dan Karang Taruna, serta masyarakat desa pada umumnya dapat memanfaatkan pengetahuan yang tersedia sebagai peluang memanfaatkan teknologi untuk mempercepat informasi dan komunikasi di Desa Sungai Baung. 2. Tersedianya informasi desa yang berbasis digital bagi masyarakat Desa Sungai Baung.

3. HASIL

Secara administrasi Desa Sungai Baung terletak di wilayah Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Desa Sungai Baung dijadikan desa definitif oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak tahun 2013 yang terdiri dari 4 dusun dan 10 RT dengan jumlah penduduk sekitar 1878 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 503 KK. Pada saat ini SDM di Desa Sungai Baung cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya, jika di lihat dari tingkat pendidikan minimal yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan dari segi mata pencaharian, mayoritas penduduk adalah berkebun seperti kelapa, sawit, laos, dan pinang (Kelompok 7, 2025).

Dalam hal tata kelola pemerintahan, Pemerintah Desa Sungai Baung juga mengalami dampak dari perkembangan teknologi informasi secara signifikan. Salah satu bentuk transformasi teknologi informasi yang kini banyak diterapkan adalah pemanfaatan website desa sebagai sarana komunikasi, pelayanan publik, dan transparansi informasi. Website desa tidak hanya menjadi media publikasi kegiatan dan program, tetapi juga menjadi jembatan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat secara lebih terbuka dan cepat. Adapun website resmi Kantor Desa Sungai Baung <https://sungaiBaung-pengabuan.desa.id/site/index.php/artikel/2016/8/24/data-desa>.

Pendampingan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian digitalisasi Desa Sungai Baung Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh mahasiswa Manajemen Pemerintahan Universitas Jambi meliputi beberapa kegiatan sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Sosialisasi Pentingnya Website Desa

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya ketelitian dan konsistensi dalam proses pengelolaan data digital, sehingga pengelolaan administrasi dan pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Keberhasilan implementasi program sosialisasi tercermin dari meningkatnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola data secara digital, khususnya dalam hal penginputan informasi kependudukan, struktur organisasi, dan profil Desa ke dalam website.



Gambar 1. Sosialisasi Website Desa

2. Pemanfaatan Website Desa

Di era digital, keberadaan website desa sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, website desa juga dapat berfungsi sebagai media promosi potensi lokal, mendukung pengembangan UMKM desa, serta memperluas akses informasi bagi warga yang berada di luar wilayah. Dengan pengelolaan yang tepat, website desa mampu menjadi alat strategis dalam mempercepat pembangunan dan pelayanan yang inklusif

berbasis teknologi. Selain itu, keterlibatan aktif perangkat desa dalam menyusun dan menerbitkan artikel terkait kegiatan dan potensi desa menjadi indikator penting lainnya yang menunjukkan bahwa website telah dimanfaatkan secara optimal sebagai media informasi dan komunikasi publik (Deandlles Christover et al., 2023).



Gambar 2. Pembuatan Artikel/Informasi Desa

3. Penginputan Data pada Website Desa

Penginputan data pada website desa merupakan langkah penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka, efisien, dan responsif. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Melalui data yang terupdate secara berkala, masyarakat desa dapat mengetahui berbagai informasi terkait administrasi, program pembangunan, anggaran, hingga potensi lokal desa secara transparan. Selain itu, penginputan data juga bertujuan mempercepat pelayanan publik berbasis digital, seperti pengajuan surat keterangan, pencatatan kependudukan, serta pelaporan kegiatan desa. Hal ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa.



Gambar 3. Kegiatan Penginputan Data Kependudukan

Melalui kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan tersebut, tidak hanya Perangkat Desa Sungai Baung, tetapi juga warga masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat mengenai digitalisasi desa melalui pemanfaatan website desa, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai media pelayanan

publik yang efektif. Dengan demikian, kehadiran website Desa yang dikelola secara optimal akan meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan publik, memperkuat prinsip transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aparatur desa (Haryonno et al., 2023).

4. DISKUSI

Digitalisasi merupakan fasilitas pelayanan yang berbasis teknologi digital diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat desa (Harahap & Harahap, 2023). Digitalisasi desa merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas administrasi, pelayanan publik, dan pembangunan desa. Ini mencakup penggunaan aplikasi pelayanan online, sistem informasi desa berbasis web, serta penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan transparansi. Pentingnya internet dan teknologi dalam era digital ini adalah untuk memastikan daya saing dan kualitas hidup masyarakat pedesaan tetap terjaga. Desa Digital akan memungkinkan masyarakat desa untuk lebih terlibat dalam ekonomi digital, belajar online, dan mengakses layanan publik dengan lebih efisien (Lailiyah, 2022).

Dari kegiatan sosialisasi terhadap pentingnya website desa dalam meningkatkan pelayanan publik di desa, khususnya Desa Sungai Baung telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perangkat desa dalam proses pengelolaan data digital, sehingga pengelolaan administrasi dan pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Apalagi pelayanan publik di era digital telah banyak mengalami perubahan. Perangkat desa di masa kini dituntut harus melek digital. Artinya, perangkat desa harus menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya adalah penggunaan sistem informasi. Sistem informasi yang diintegrasikan dengan berbagai urusan yang ada di desa, akan membantu perangkat dan kepala desa dalam mengambil kebijakan, dan melakukan pelayanan kepada masyarakat (dkk, 2022).

Dalam hal pemanfaatan, website desa dapat menampilkan informasi tentang profil desa, data kependudukan, agenda kegiatan, laporan anggaran, hingga produk unggulan desa. Keberadaan website ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang terbuka dan partisipatif, sekaligus sebagai alat promosi potensi lokal di tingkat yang lebih luas. Melalui program digitalisasi desa, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari penyelenggara pemerintahan desa lebih terasa dan sangat mudah (Tazam & Safitri, 2024). Namun, pemanfaatan website desa masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur internet, dan minimnya literasi digital. Oleh karena itu, masih memerlukan perhatian dan strategi yang tepat agar website desa benar-

benar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan desa yang berbasis digital.

Kegiatan pengabdian ini sudah di lakukan sesuai tahap yang di rencanakan dengan melibatkan partisipasi dari Perangkat Desa, Pelaku UMKM, Kelompok PKK, Karang Taruna serta Masyarakat Desa Sungai Baung. Harapannya dengan pemanfaatan website desa secara optimal, pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses informasi, dan membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Website desa bukan hanya alat publikasi, tetapi juga wujud nyata dari komitmen transparansi dan inovasi dalam tata kelola desa.



Gambar 4. Foto Bersama

Ke depan, dengan dukungan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM, website desa diharapkan mampu menjadi pilar utama digitalisasi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi desa dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Digitalisasi desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, efisien, dan partisipatif. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan publik di desa dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Website desa, sistem informasi pelayanan, dan aplikasi digital lainnya telah membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah desa dan warganya.

Melalui program pengabdian di Desa Sungai Baung telah memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui digitalisasi desa. Dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola website desa sebagai sarana informasi dan pelayanan publik.

Namun, keberhasilan digitalisasi desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi saja, tetapi juga di dukung oleh kesiapan sumber daya manusia, literasi digital, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah,

masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan transformasi digital desa berjalan berkelanjutan dan inklusif.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Sungai Baung Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah bersedia menerima dan memfasilitasi mahasiswa Diploma IV Manajemen Pemerintahan FEB Universitas Jambi untuk melakukan kegiatan pengabdian sebagai salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam pembangunan desa. Terima kasih kepada masyarakat Desa Pengabuan yang turut berpartisipasi dan bekerjasama dalam berbagai kegiatan pengabdian ini, semoga apa yang telah dilaksanakan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kita semua, amiin.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, M. (2018). Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95.
- Christover, D., Hidayattullah, A. S., & Mawarni, I. (2023). Penerapan konsep-konsep digitalisasi dalam pelayanan publik di Kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(2), 199–214. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i2.73>
- Faozanudin, M. (Ed.). (2022). *Pemberdayaan masyarakat: Dialektika partisipasi publik dan pembangunan*. SIP Publishing.
- Gaspar, N. A., Welly, W., & Kumayas, N. (2023). Efektivitas pelayanan publik berbasis aplikasi Bitung Digital City (DC) di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–9.
- Gislawati, R. T., & Karniawati, N. (2024). Efektivitas pelayanan publik berbasis e-government melalui aplikasi Sakedap di Kabupaten Bandung. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, 5(1), 57–70. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v5i1.7980>
- Harahap, A. F. R., & Harahap, A. M. (2023). Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 769. <https://doi.org/10.29210/1202323208>
- Haryonno, H., Febrianti, E., & Eprilianto, D. F. (2023). Pendampingan digitalisasi desa sebagai upaya pengembangan pelayanan digital Desa Pamotan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1960–1965.
- Info, A. (2025). Bentuk dan faktor penerapan digitalisasi pelayanan publik oleh pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(1), 69–78.

- Irian, M., Komber, S., Irwan, A., Budi, R., & Kambu, Y. (2025). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada kinerja pegawai di Provinsi Papua Barat Daya. *Jurnal Samakta*, 2(1), 46–56. <https://doi.org/10.61142/samakta.v2i1.199>
- Kelompok 7. (2025). *Laporan pelaksanaan kegiatan KKNT Mahasiswa Universitas Jambi 2025*.
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi desa sebagai upaya percepatan pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26–34. <https://doi.org/10.55686/ristek.v6i2.112>
- Maarif, I. (2024). Optimalisasi penerapan sanksi administratif melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 1(1).
- Rizky, A. M., Pratiwi, M. P., Chairunnisa, A., & Aiko, I. A. (2025). E-government: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 5.
- Sangian, D. A., Dengo, S., & Pombengi, J. D. (2018). Pendekatan partisipatif dalam pembangunan di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(56).
- Sugiman. (2018). Pemerintah desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 84–85.
- Tazam, M., & Safitri, E. (2024). Digitalisasi desa sebagai upaya percepatan kemajuan pelayanan publik dan ekonomi desa. *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep*, 3(2), 182–193.